BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Adanya hubungan antar bangsa sudah lama terjadi dan hubungan tersebut berlangsung dalam suatu masyarakat yang disebut dengan masyarakat antar bangsa. Hubungan yang semula dalam bentuk primitif kemudian berkembang ke dalam bentuk yang lebih modern. Hubungan tersebut terjadi karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan orang lain.

Hubungan internasional merupakan salah satu bentuk interaksi antar aktor yang saling berkepentingan, yang dapat berupa kerjasama, konflik, ataupun perang. Hubungan internasional merupakan displin ilmu yang sedang tumbuh berkembang. Dahulu dalam interaksinya hanya melibatkan aktor negara, namun sekarang aktor bukan negara dapat terlibat dalam berinteraksi antar negara. Dari sisi isu, jika pada awal kemunculannya pada akhir abab ke 19 disiplin HI lebih memfokuskan pada isu diseputar masalah peperangan dan perdamaian (*war and peace*), maka pada perkembangan selanjutnya HI mulai merambah kepersoalan yang menyangkut kerjasama ekonomi antar negara, upaya memerangi kemiskinan global, memahami ketimpangan hubungan antara kelompok negara kaya dengan negara miskin, upaya memahami dan memerangi kriminalitas antar negara

(*transnational crime*), upaya untuk mengatasi konflik dan separatisme, dan sebagainya (Hermawan, 2007:1-2).

Dari sisi aktor, karena membahas isu yang berkaitan dengan peperangan dan perdamaian, maka pada awalnya (dan bahkan hingga saat ini) disiplin HI sesungguhnya menitik beratkan pada "negara" (*state*) sebagai subjek rujukannya. Jika seorang pakar HI berbicara mengenai perilaku, kepentingan, pembuatan keputusan dan sebagainya, maka semua itu mengarah pada negara. Bagi para pakar HI setidaknya sebagian besar dari mereka negara adalah "pemegang kekerasan yang dominan" (*legitimate violence dominator*) yang dapat menggunakan kekerasan secara abash (*legitimate*) karena berhak menggunakan kekuatan militer, kepolisian dan kehakiman untuk menegakkan keamanan, ketertiban dan hukum (Hermawan, 2007:2).

Dalam interaksi tersebut sering timbul berbagai masalah, oleh karena itu maka hubungan internasional perlu untuk dipahami dan dipecahkan dalam bentuk studi. Studi hubungan internasional itu sendiri dengan demikian merupakan suatu studi tentang interaksi yang terjadi diantara negara-negara berdaulat di dunia atau merupakan studi tentang para pelaku bukan negara atau *non-state* aktor yang perilakunya mempunyai pengaruh dalam kehidupan negara berbangsa.

Hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan merupakan salah satu contoh dari sekian banyak fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional, aktor hubungan internasional bisa saja merupakan merupakan aktor negara atau juga aktor non negara seperti yang dijelaskan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani:

> "Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu" (Perwita dan Yani, 2005:4).

Pada dasarnya, hubungan internasional mengacu pada seluruh bentuk interaksi hubungan antar negara. Hubungan yang terjadi di antara negara-negara tersebut dapat merupakan suatu hubungan kerjasama atau merupakan hubungan yang ditandai dengan konflik atau persaingan.

Setiap negara akan melakukan interaksi dengan negara lainnya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya dan mencapai suatu kepentingan bersama. Interaksi yang terjadi antar negara tersebut didasari oleh adanya keterbatasan dari tiap negara dalam upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan nasional mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad:

> "Tujuan studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik, serta interaksi dalam organisasi internasional" (Perwita dan Yani, 2005:4-5).

Studi hubungan internasional merupakan sebuah bidang studi yang dinamis. Penyebabnya adalah dinamika yang terjadi dalam sistem internasional itu sendiri. Hubungan-hubungan atau interaksi antar negara merupakan hal yang paling mendasar dalam hubungan internasional, hal ini dapat dipertegas dengan melihat definisi dari hubungan internasional, yakni hubungan internasional mengacu pada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang berlainan,

baik dari aktor pemerintah maupun bukan pemerintah. Hubungan internasional tercipta dari sebuah interaksi yang terfokus pada masalah ekonomi dan perdagangan, lingkungan, energi, serta permasalahan sosial budaya (Perwita dan Yani, 2005:128).

Robert Jackson dan George Sorensen dalam bukunya pengantar studi hubungan internasional, hubungan internasional dapat didefinisikan sebagai studi hubungan dan aksi antar negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi intrnasional, organisasi non pemerintahan dan perusahaan multinasional. Hubungan internasional dapat berupa subjek teoritis dan subjek kebijakan dan pendekatan akademis terhadapnya dapat bersifat empiris atau normati atau keduanya. HI sering sering dianggap sebagai cabang ilmu politik, tetapi juga merupakan subjek yang dipelajari pakar sejarah (sejarah internasional atau atau sejarah diplomatik) dan pakar ekonomi (ekonomi internasional), HI juga merupakan bidang studi legal (hukum internasional publik) dan bidang filsafat (etika internasional). Dari prespektif yang lebih luas tersebut, HI jelas merupakan *inquiry* (riset empiris) interdislipiner (Jackson dan Sorensen, 2005:4).

Terdapat dua isu tradisional utama dalam Hubungan Internasioanl yakni isu keamanan nasional dan ekonomi global. Robert Jackson dan Sorensen juga mengatakan, bahwa Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependens perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan

lembaga-lembagas swadaya masyarakat (LSM) Internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya (Jackson &Sorensen, 2005:34).

Dalam perjalanannya ilmu hubungan internasional terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, Hubungan internasional yang pada awalnya hanya mempelajari tentang hubungan antar negara-negara yang berdaulat telah mengalami pergeseran, dimana muncul aktor-aktor lain dalam ilmu hubungan internasional yang juga mempunyai peranan penting seperti *non state actor*. Hubungan internasional yang pada awalnya hanya mengkaji peperangan dan perdamaian kemudian memperluas bentuk kajiannya yaitu untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan juga kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antara negara atau antarbangsa dalam konteks sistem global, menjadi kajian hubungan internasional yang tidak hanya fokus pada hubungan politik yang berlangsung antar negara, tapi juga mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara, inilah kemudian yang disebut dengan hubungan internasional kontemporer (Rudy, 2003:51).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai “Kepentingan Nasional” (Rudy, 2002:116).

Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara atau sehubungan dengan hal yang yang dicita-citakan. Dalam hal ini, kepentingan nasional relatif tetap dan sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini, yaitu keamanan dan kesejahteraan, pasti terdapat serta merupakan landasan dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara.

Interaksi yang dilakukan sebuah negara dengan negara lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya yang dituangkan dalam kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional merupakan wadah dari tujuan, strategi dan kebijakan nasional yang dalam hal ini dijelaskan oleh Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, sebagai:

> **"**Strategi aktor negara dalam menyikapi kecenderungan interaksi global dapat dilihat dari konsep tujuan atau kepentingan nasional yang mendasarinya. Tujuan suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur pembentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, serta kesejahteraan ekonomi dan seluruhnya kemudian menjadi faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa tujuan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu Negara" (Perwita dan Yani, 2005:35).

Dalam ranah internasional, kerjasama juga merupakan tindakan yang dipandang sebagai panggung atau arena dalam tuntutan-tuntutan yang mana membahas mengenai kepentingan akan aktor-aktor yang disebabkan karena keterbatasan yang melekat dalam diri negara yang menjalin kerjasama. Sehingga dalam hal ini negara berusaha menggunakan kepentingan nasional sebagai

komponen yang dirumuskan dan kemudian diperjuangkan dalam sebuah hubungan. Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudy, kepentingan nasional yaitu:

> "Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan - tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudy. 2002:116).

Masing-masing negara dalam sistem internasional saling berinteraksi sejalan dengan upaya mengembangkan kebijaksanaan luar negeri serta menyelenggarakan tindakan diplomatik dalam rangka menjangkau kepentingan nasional yang telah ditetapkan secara subjektif. Meski para pembuat keputusan harus berhubungan dengan berbagai variabel didalam lingkungan internasional, tetapi konsep kepentingan nasional biasanya tetap merupakan faktor yang paling penting serta berfungsi sebagai tonggak petunjuk arah bagi para pembuat keputusan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri.

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau *state* berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep *power* kepentingan *interest* didefinisikan ke dalam terminologi *power* (Sitepu, 2011:56).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu *power* yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011:163).

Dalam kepentingan nasional, terdapat pembedaan yang mendasar yaitu: kepentingan nasional yang besifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang besifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup suatu negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional non-vital atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama (Jemadu, 2008:67-69).

2.1.3 Konsep Keamanan

Definisi yang paling sering digunakan oleh penstudi HI adalah definisi dari Barry Buzan yang dalam bukunya *People, States, and Fear* mengatakan bahwa Keamanan, dalam arti obyektif, mengukur tidak adanya ancaman terhadap nilai yang diperoleh, dalam pengertian subjektif, tidak adanya rasa takut bahwa nilai-nilai semacam itu akan diserang (Buzan, 2008:4).

Secara tradisional, keamanan didefinisikan dalam istilah militer, dengan fokus utama pada perlindungan negara dari ancaman terhadap kepentingan nasional. Konsep keamanan yang dimaksudkan terbatas ruang lingkup studi perlindungan seseorang terhadap penggunaan kekuatan orang lain. Konsepsi ini terkait erat dengan keamanan nasional, yang berarti perlindungan wilayah dari ancaman dan serangan militer eksternal, yang diakui sebagai yang paling berdaulat. Setiap negara berlomba-lomba memperkuat armada militernya untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) serangan yang datang. Bisa disimpulkan dalam pandangan tradisional bahwa keamanan di ukur dari kapabilitas militer untuk melindungi *national interest* dari ancaman yang berasal dari negara lain.

Keamanan kolektif menyediakan landasan normatif dan sarana pengaturan perilaku negara-negara berdaulat dan konflik di antara mereka. Selain itu keamanan kolektif menyediakan pula prosedur kelembagaan yakni legalisasi respon kolektif dalam mengatasi ancaman tradisional berorientasi militer untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Namun, tantangan terhadap kedaulatan keamanan kolektif telah muncul, terutama setelah

berakhirnya Perang Dingin. Hal ini dikarenakan ancaman keamanan yang dirasakan makin beragam, seperti munculnya masalah keamanan transnasional, semakin besar peran yang dimainkan oleh aktor non-negara. Kondisi demikian pada gilirannya menumbuhkan dugaan ketidakefektifan akan pengaturan internasional dalam menanggapi tantangan-tantangan keamanan yang dinamis tersebut.

Pada masa terjadinya Perang Dingin, keamanan nasional diartikan sebagai hubungan konflik dan kerjasama antar negara. Definisi keamanan bertumpu pada konflik ideologis antara blok Barat dan blok Timur. Namun, setelah Perang Dingin berakhir, definisi dari keamanan nasional semakin diperluas, dengan meliputi pula soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik, dan berbagai masalah sosial lainnya (Perwita & Yani, 2005:119).

Dalam konteks sistem internasional maka keamanan adalah kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka. Untuk mencapai keamanan, kadang-kadang negara dan masyarakat berada dalam kondisi harmoni atau sebaliknya. Dalam studi hubungan internasional dan politik internasional, keamanan merupakan konsep penting yang selalu dipergunakan dan dipandang sebagai ciri eksklusif yang konstan dari hubungan internasional (Buzan, 2008:2). Karena konsepsi keamanan nasional ini senantiasa memiliki hubungan erat dengan pengupayaan, pertahanan dan pengembangan kekuatan atau kekuasaan sepanjang kaitannya dengan analis hubungan internasional dan politik luar negeri, maka dalam pengaplikasiannya

selalu menimbulkan perdebatan sehingga langkah ke arah konseptualisasinya tidak selalu berjalan seiring. *Power* atau kekuasaan itu sendiri secara simplistis merupakan kemampuan satu unit politik (negara) dalam mencegah konflik dan mengatasi rintangan-rintangan. Penyimpulan Buzan menyebutkan bahwa aspek keamanan ini telah menjadi satu pendekatan dalam Studi Hubungan Internasional kontemporer dengan menunjuk kepada motif utama perilaku suatu negara, yang memiliki perbedaannya sendiri dengan *power* sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk terciptanya perdamaian (Buzan, 2008:2).

Konteks anarki menentukan tiga kondisi utama dalam konsep keamanan yaitu (Buzan, 2008:22) :

1. Negara merupakan objek utama dalam keamanan karena kedua-duanya adalah kerangka aturan dan sumber tertinggiotoritas pemerintah. Hal ini menjelaskan mengenai kebijakan utama yaitu keamanan nasional.
2. Meskipun negara adalah objek utama keamanan tetapi dinamika keamanan nasional memiliki hubungan yang tinggi dan adanya interdependensi antara negara. Ketidakamanan negara dapat atau tidak dapat mendominasi agenda keamanan nasional tetapi ancaman eksternal akan selalu terdiri dari elemen-elemen utama dalam masalah keamanan nasional. Oleh karena itu, ide keamanan internasional dapat digunakan pada kondisi sistemik yang mempengaruhi usaha negara untuk membuat negara lain merasa lebih aman atau sebaliknya.

Dengan adanya kondisi anarki, arti praktis keamanan hanya dapat dibentuk jika ada suatu hubungan persaingan dalam lingkungan operasional yang tidak

dapat dielakkan. Jika keamanan bergantung pada hegemoni atau harmoni maka hal ini tidak dapat dicapai dalam kondisi anarki. Dengan kata lain keamanan bersifar relatif bukan absolut.

Konsep keamanan merupakan salah satu pendekatan dalam mengkaji hubungan internasional yang lebih baik, mendalam dan berguna dibanding dengan konsep kekuatan dan perdamaian. Konsep keamanan ini dapat dilihat sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrem antara kekuatan dan perdamaian (Buzan, 2008:2-3).

Pemahaman terhadap konsep di atas menjelaskan kepada penempuh studi hubungan internasional bahwa *sekuritisasi* pada dasarnya meliputi masalah-masalah keamanan yang tidak saja di angkat menjadi agenda politik. Selain itu isu-isu keamanan yang memperoleh status sebagai *existential threat* menuntut adanya upaya-upaya tindakan nyata akan yang begitu besar untuk mengatasi berbagai isu atau ancaman yang di hadapi para *referent actor,* lebih lanjut studi mengenai *securitysasi* adalah studi mengenai *retorika* yang di gunakan dalam keterkaitanya dengan ancaman.

Selanjutnya keamanan (*security*) di sini dapat kita bedakan dengan konsep pertahanan (*defense*) yang memiliki kesamaan dari segi tujuannya, yaitu kemerdekaan atas ancaman yang mengganggu kebebasan dalam melaksanakan kedua konsep di atas, dimana keamanan biasanya lebih bersifat preventif dan antisipatif dalam merespon ancaman dibandingkan pertahanan. Keamanan yang dimaksud di dalam pendekatan ini tidak sebatas pada keamanan saja,

tetapi mencakup keamanan militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan, seperti yang dipaparkan di bawah ini:

1. Keamanan militer, mencakup interaksi antar dua tingkat dan kekuatan yaitu kemampuan defensif dan persepsi militer mengenai intensi masing-masing pihak.
2. Keamanan politik, mencakup kesinambungan dan stabilitas organisasi suatu negara atau sistem pemerintahan serta ideologi yang melegitimasi kedua hal tadi.
3. Keamanan ekonomi, mencakup akses pada sumber daya finansial maupun pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara.
4. Keamanan sosial, mencakup kemampuan untuk mempertahankan dan menghasilkan pola-pola tradisional dalam bidang bahasa, kultur, agama, dan identitas nasional.
5. Keamanan lingkungan, mencakup pemeliharaan lingkungan lokal sebagai pendukung utama kelangsungan hidup manusianya (Buzan, 2008:6-8).

Meskipun masing-masing sektor tersebut mempunyai titik-titik vokal dalam kerangka masalah-masalah keamanan, dan merumuskan cara-cara sendiri dalam menentukan prioritas kebijakan utama suatu negara namun faktor-faktor itu sendiri saling terkait dalam operasinya (Buzan, 2008:19). Masalah-masalah keamanan yang muncul salah satunya bisa berupa tindakan peningkatan kekuatan militer suatu negara, dan pendekatan yang demikian apabila dilakukan secara terus menerus pada gilirannya dapat menimbulkan apa yang disebut dilema

keamanan (Buzan, 2008:295). Dilema keamanan ini dapat terjadi apabila peningkatan kapabilitas pertahanan dan keamanan dipersepsikan sebagai ancaman dan petunjuk sikap bermusuhan oleh pihak lain. Demikian suatu reaksi atas aksi yang dilakukan suatu pihak akan menimbulkan reaksi yang baru dari pihak lain.

2.1.3.1 Stabilitas Keamanan

Jika berbicara mengenai keamanan, maka erat kaitannya dengan permasalahan stabilitas. Stabilitas nasional yang dimiliki suatu negara pun menjadi penting. Hal ini dikarenakan stabilitas nasional dapat menjadi alat ukur kemampuan suatu negara dalam mengatasi ancaman multidimensional untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup warga negaranya. Cara yang dilakukan adalah dengan menyeimbangkan semua instrument kebijakan negara melalui pemerintahan (Paleri, 2008:449). Sehingga dapat dikatakan bahwa stabilitas nasional bagi suatu negara adalah vital karena berkaitan dengan kesejahteraan dan kelangsungan hidup warga negaranya. Pengertian stabilitas regional dapat diartikan sebagai sejauh mana hubungan antara negara-negara dikawasan tersebut dalam mengatasi kekerasan dan ancaman, baik secara langsung atau tidak langsung, dan bisa berasal dari segala aspek seperti *geostrategic*, politik, dan sosial ekonomi (Paribatra, 2012:57). Sehingga keadaam di dalam kawasan dapat di nilai dari bagaimana kawasan tersebut menjaga stabilitas regionalnya.

Meningkatnya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain memunculkan fenomena regionalisme atau faham-faham kawasan, di mana negara-negara saling bekerjasama, Dengan terbentuknya aliansi, suatu kawasan

dapat lebih terjaga stabilitas, baik secara politik, ekonomi, dan keamanan. Pengertian stabilitas menurut Jack C. Plano, yakni:

> "Suatu kondisi dari sebuah sistem yang komponennya cenderung tetap didalam atau kembali kepada suatu hubungan yang sudah mantap. Stabilitas sama dengan tiadanya perubahan yang mendasar atau kacau didalam suatu system politik atau perubahan yang terjadi pada batasbatas yang telah disepakati/ditentukan" (Plano, 2009:49).
> Stabilitas diartikan sebagai kemungkinan bahwa sistem yang berlaku tetap

memiliki semua ciri-ciri pokok, tidak ada satupun bangsa yang menjadi dominan. Adapun yang menjadi syarat terwujudnya stabilitas. Terwujudnya stabilitas diasumsikan tiga syarat, yaitu:

1. Negara-negara dikawasan yang mempunyai kepentingan dalam kawasan bisa dihambat/dicegah secara efektif karena adanya solidaritas dan kohesi ataupun organisasi.
2. Negara-negara di regional/kawasan berhasil mengelola/menghapuskan masalah-masalah yang dapat menimbulkan friksi anatagonis di kawasan.
3. Ketegangan antar negara-negara dikawasan berada pada tingkat rendah bahkan tidak ada sama sekali dan mekanisme-mekanisme institusional dalam bentuk organisasi dapat dipergunakan untuk memperoleh solusi tentang berbagai masalah kawasan (Yani, dkk, 2017:5).

Negara menjadi aktor yang paling memiliki kekuatan dalam sistem internasional. Terdapat standar universal bahwa tidak ada aktor yang lebih tinggi kedudukannya daripada negara. Negara harus mampu melindungi dirinya sendiri yang kemudian dikenal dengan *self-help.* Hubungan yang dibangun antarnegara dalam sistem internasional dianggap sebagai upaya negara untuk mencapai *power.* Setiap negara harus bisa mempertahankan eksistensinya sehingga tercipta *balance*

of power dalam sistem internasional untuk menghindari adanya hegemoni (Yani, dkk, 2017:5).

2.1.3.2 Keamanan Regional

Kemanan regional merupakan suatu kondisi kawasan yang berhubungan dengan perasaan ketakutan yang di persepsikan oleh negara-negara didalam kawasan tertentu karena keberadaan ancaman didalam kawasan tertentu karena keberadaan ancaman didalam kawasannya. Hal ini berarti, keamanan regional merupakan persepsi dari semua negara yang terdapat didalam kawasannya, dimana masing-masing negara memiliki persepsi, kekuatan, dan kemampuan serta kepentingan nasional yang berbeda-beda (Yani, dkk, 2017:6).

Sedangkan kata regional sebagaimana dalam kamus *Webster's new international dictionary,* kata *region,* diartikan regional (kawasan) sebagai bagian integral dari dunia ini juga merupakan gambaran dari dunia dalam lingkup yang lebih kecil dan karakteristik yang spesifik. Dalam kamus hubungan internasional, dijelaskan arti kata *region* adalah:

> "Istilah *region* digunakan dalam sejumlah konteks sejumlah makna dalam hubungan internasional. Terkadang makna ini saling tumpang tindih; Terkadang saling bertentangan satu sama lain. Yang utama penggunaan akal sehat berkonotasi akan kedekatan fisik. Memang kedekatan tampaknya perlu, meski tidak mencukupi, kondisi atau kedekatan nampaknya menjadi prasyarat penting untuk menciptakan dan memelihara rasa persatuan" (Yani, dkk, 2017:6).

Dalam konteks hubungan internasional, makna regional lebih bersifat adanya hubungan-hubungan antarnegara atau pengelompokan negara-negara karena adanya kesamaan atau kedekatan. Pengelompokan tersebut berlangsung dalam kerangka kesamaan atau kedekatan geografis, berdasarkan kondisi

perekonomian dan berdasarkan frekuensi interaksi atau mobilitas antarnegara (Yani, dkk, 2017:6). Dari penjelasan tersebut, maka keamanan regional merupakan suatu masalah yang sangat kompleks.

Menurut Barry Buzan dalam bukunya, *Region and Powers the Structure of International Security* mengemukakan bahwa:

> "Gagasan utama RSCT (*Regional Security Comlex Theory*) adalah bahwa, kebanyakan ancaman berjalan lebih mudah dalam jarak dekat daripada jarak yang jauh, keamanan yang saling berkertergantungan biasanya masuk ke dalam kelompok yang berbasis regional dan dengan demikian tingkat saling ketergantungan keamanan lebih intens antara aktor yang ada di dalam kompleks daripada aktor yang ada di luarnya (Buzan & Waever, 2003:4)."

Dari teori yang dikemukakan oleh Buzan tersebut, tergambar bahwa ancaman yang ada semakin menyebar baik pada jarak dekat maupun pada jarak yang jauh sekalipun. Oleh karena itu, interdependesi keamanan dalam suatu kawasan pun terjadi, sehingga menjadikan keamanan tersebut menjadi semakin kompleks. Hal ini menyebabkan meningkatnya hubungan antar aktor yang terlibat baik secara langsung di dalam maupun aktor yang terlibat di luar keamanan yang ada.

Oleh karena itu, keamanan regional akan terdiri dari keamanan semua aktor (negara) didalamnya. Dengan kata lain, keamanan regional adalah *resultant* dari kumpulan keamanan nasional para aktornya dan keamanan nasional para aktornya juga merupakan *resultant* dari keamanan setiap *referent object* masing-masing negara. Dengan demikian, *resultante* dari kemanan regional pada semua kawasan didunia akan menentukan kondisi keamanan global, dan keaman regional pada suatu kawasan juga merupakan *resultant* keamanan (nasional) para aktor (negara-negara) didalamnya (*Regional Security complex)* (Yani, dkk, 2017:7).

Berhubungan dengan keamanan baik nasional maupun internasional. Yang dapat dilakukan oleh sebuah negara untuk menangkal hal ini adalah dengan membuat sebuah kebijakan keamanan regional yang difokuskan pada negara itu sendiri. Sebagai upaya untuk meredam keamanan nasional dalam negeri, sekaligus dengan tidak melupakan kebijakan luar negeri untuk mengurangi ancaman dari luar.

2.1.4 Kerjasama Internasional

Suatu negara tidaklah dapat berjalan tanpa ada hubungan negara lain. Bantuan dan kerjasama dengan negara lain pastilah dibutuhkan. Bentuk kerjasama dapat berupa kerja sama dibidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Tujuannyapun berbeda-beda bagi setiap negara, salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari kenyataan itu menunjukan perlunya kerjasama dengan negara lain (Tambunan, 2000:45).

Perwita dan Yani, dalam bukunya ilmu hubungan internasional mendefinisikan kerjasama dalam hubungan internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Kerjasama Internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia.

Kerjasama internasional, yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar

negeri masing-masing negara. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi didalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (Perwita & Yani, 2005:33-34).

Bentuk-bentuk dalam kerjasama internasional berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan kerjasama antara lain dibedakan menjadi kerjasama bilateral, multilateral, trilateral dan regional. Sebagai salah satu bentuk kerjasama, kerjasama bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan antara dua buah pihak. Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan bilateral (Perwita & Yani, 2005:33).

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. Tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 34).

Kerjasama internasional mengandung satu interaksi, interelasi dan interdependensi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dari satu kesatuan unit dalam system internasional dan masyarakat internasional:

> "Kerjasama internasional dapat dijalankan dalam berbagai bentuk organisasi internasional, walaupun negara tetap menjadi aktor yang dominan di dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional non-pemerintah yang makin hari makin banyak jumlahnya" (Rudy, 2003:3).

Mengenai masalah kerjasama internasional merupakan bukti dari adanya saling pengertian antar bangsa (*international understanding*) sebagai akibat dari adanya interdependensi antar bangsa dan bertambah kompleksnya kehidupan dalam masyarakat internasional (Perwita & Yani, 2005:121).

2.1.4.1 Kerjasama Keamanan

Berbicara mengenai kemanan internasional tentunya ada beberapa teori dan konsep yang dapat digunakan dalam menganalisa masalah studi keamanan internasional dewasa ini. Salah satu konsep yang sering digunakan dalam menganalisa kasus dalam studi keamanan internasional adalah konsep *cooperative security*.

> "Sebuah proses dimana negara - negara dengan kepentingan bersama bekerja bersama-sama melalui kesepakatan mekanisme untuk mengurangi ketegangan dan kecurigaan, menyelesaikan atau mengurangi perselisihan, membangun kepercayaan diri, meningkatkan prospek pembangunan ekonomi, dan menjaga stabilitas di daerah mereka" (Muladi, 2012:2).

Konsep *cooperative security* berkembang atas dasar beberapa hal:

1. Masalah saat ini berada diluar kemampuan dari negara per negara untuk memecahkannya, karena bersifat transnasional dan jauh dari kenyataan terjadinya framentasi dan desentralisasi tertib keamanan pasca Perang Dingin di satu pihak dan fenomena globalisasi ekonomi internasional, teknologi informasi dan ketertiban sosial di lain pihak yang disamping bersifat positif, juga memunculkan bahaya-bahaya keamanan baru, disamping bahaya keamanan tradisional atau yang bersifat simetrik dan *state centric* memungkinkan berkembangnya bahaya kemanan baru yang bersifat asimetrik atau non-tradisional yang didominasi peranan actor-aktor non-negara terhadap *human security.*
2. Terjadinya fenomena penyebarluasan senjata-senjata berteknologi maju yang senyatanya diproduksi oleh sektor swasta yang memerlukan pengawasan akibat praktek privatisasi teknologi.
3. Kemajuan atau modernisasi alat komunikasi, transportasi dan informatika diera globalisasi.
4. Konsep *competitive security* yang bersifat tradisioal melalui pembangunan militer atau berusaha mendominasi keamana regional, ternyata tidak menghasilkan hal-hal positif dan bahkan menciptakan masalah-masalah internal.
5. Konsep *cooperative security* diharapkan dapat meningkatkan kesadaran betapa pentingnya suatu struktur lingkungan yang terintegrasi antar negara, sehingga mampu memelihara kesejahteraan dan keamanan rakyatnya (Muladi, 2012:2-3).

Kerjasama keamanan adalah mereka yang biasanya mengerti kolaborasi antara pihak-pihak yang bertikai. Ini adalah alasan mengapa aliansi biasanya ditangani sebagai *sui generis*/yang secara harfiah diartikan dari jenisnya atau genusnya sendiri. Dalam bidang hukum istilah *sui generis* digunakan untuk menyebut jenis jenis aturan hukum yang dibuat secara khusus untuk mengatur suatu hal yang bersifat spesifik atau unik. Namun perbedaan ini tidak sepenuhnya meyakinkan jika hubungan internasional dipandang anarki dimana pada dasarnya konflik dapat terjadi antara sepasang aktor mana pun, maka aliansi cenderung bermasalah jika kerjasama sementara yang dilakukan untuk menangkis ancaman yang akan segera mengancam mitra sementara yang mungkin terlalu banyak berkerjasama dan dalam keamanan yang lebih sedikit dan dalam kasus terburuk kehilangan kedaulatan (Carlsnaes dkk, 2002:370).

Istilah kerjasama keamanan secara bergantian digunakan sebagai terjemahan dari *"security cooperation"* atau *"cooperative security"*. Dengan istilah *"cooperative security"* dapat digambarkan adanya penekanan perbedaan dengan pendekatan konvensional seperti *"collective defence and collective security"*. *"collective defence"* menekankan pada pembentukan *"military alliances"* (*defence pact*) diarahkan untuk melawan musuh yang bersifat spesifik. Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah bersifat konfrontatif, yang ditujukan untuk mencegah atau menghalangi serangan musuh dengan cara memelihara kemampuan militer untuk melancarkan serangan balik (Anthony, 2004:319).

Sebaliknya pengertian *"cooperative security"* mendorong negara-negara untuk melakukan suatu pendekatan kerjasama dan bertujuan membangun usaha-usaha multilateral tanpa beranggapan adanya hubungan antara teman-musuh. Dengan demikian merupakan usaha untuk mencapai *"security with others"*, sedangkan *"collective defence"* merupakan suatu usaha untuk memelihara prinsip *"security against enemy"*. Selanjutnya tujuan *"collective security"* adalah mematahkan agresi melalui pemeliharaan kekuatan militer untuk menghukum agresor. Didalam kerangka *"collective security"* ini, asas *"one for all, all for one"* diterapkan. Agresi terhadap salah satu anggota dianggap sebagai suatu serangan terhadap seluruhnya, sehingga semua anggota dapat menghukum agresor.

Sebaliknya *"cooperative security"* pada hakikatnya bersifat *"non-militeristic"*. Dalam kerangka kerjasama ini semua peserta bekerjasama untuk meningkatkan stabilitas suatu kawasan, yang sangat didambakan oleh semua anggota. Asas yang berlaku dalam hal ini adalah *"all for all"* (CSCAP dalam Anthony, 2004:319).

Hal ini sangat menjiwai makna *"security community"* yang memungkinkan para anggotanya untuk mengembangkan rasa *"we-ness"* atau *"we-feeling"* dan ada suatu jaminan bahwa mereka tidak akan berkelahi secara fisik satu sama lain dan akan menyelesaikan segala perselisihannya dengan cara lain yaitu cara damai.

2.1.5 Aliansi

Salah satu upaya dalam *balance of power* adalah pembentukan aliansi. Aliansi adalah sebuah koalisi negara-negara yang mengoordinasikan tindakan mereka untuk sejumlah tujuan tertentu. Kebanyakan aliansi diformalkan dalam perjanjian tertulis, yang memfokuskan pada ancaman bersama dan isu-isu yang berhubungan dengan keamanan internasional. Jika aktor-aktor bertujuan untuk terikat bersama dalam jangka waktu pendek, kurang formal, atau lebih kepada isu yang spesifik, asosiasi tersebut biasanya disebut dengan koalisi daripada aliansi (Yani dkk, 2017:84).

Aliansi memiliki tujuan dalam menambah kekuatan relatif anggotanya terhadap negara lain. Dengan menggabungkan kapabilitas kekuatan, dua atau lebih negara dapat menggunakan pengaruh yang lebih besar dalam posisi tawar dengan negara lain. Bagi negara yang lebih kecil, aliansi dapat menjadi elemen kekuatan penting dan bagi negara kuat, struktur aliansi membentuk konfigurasi kekuatan dalam sistem.

Aliansi dapat bertujuan *offensive* dan *defensive.* Jika *offensive,* aliansi digunakan atau dimanfaatkan suatu negara untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk memberikan serangan kepada negara tertentu. Jika *defensive,* aliansi dijadikan alat bagi negara untuk memobilisasi kekuatan yang cukup untuk menangkal serangan atau jika perang terjadi, aliansi digunakan untuk mempertahankan diri. Maka dari itu, dapat disebutkan bahwa aliansi adalah persetujuan dari negara-negara untuk mendukung satu sama lain dalam konteks militer untuk menahan atau melakukan serangan ataupun juga untuk

meningkatkan kepentingan masing-masing. Aliansi dapat berbentuk bilateral atau multilateral, rahasia atau terbuka, untuk jangka waktu lama atau pendek (Yani dkk, 2017:85).

Dalam *regional security complex theory*, pola aliansi diantara kekuatan-kekuatan utama dalam sebuah kawasan (*main power)* menjadi salah satu bentuk standar dari sebuah RSC, yang selanjutnya dalam pola tersebut dapat ditambahkan dengan efek yang di timbulkan oleh penetrasi dari *eksternal power*. RSC standar bisa berbentuk formasi konflik, rezim keamanan, *security communities,* tergantung dalam hubungan diantara negara-negara yang terdapat dalam RSC tersebut. Apakah hubungan tersebut berbentuk persaingan, keseimbangan (*balances),* aliansi, *concert* atau *friendship.*

Terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong suatu negara untuk beraliansi, selain untuk mempertahankan diri dari ancaman musuh. Diantaranya faktor ideologi yang sama. Negara akan memilih untuk beraliansi dengan negara lain yang pandangan politiknya sama faktor ekonomi, hubungan ekonomi yang erat dapat menciptakan suatu aliansi yang kuat, terutama jika salah satu negara bergantung satu sama lainnya (Yani dkk, 2017:120).

Negara biasanya melakukan aliansi dan kerjasama dengan negara yang memiliki *power* kuat atau dapat juga melakukan aliansi untuk mencari *power* dan kekuatan. Jika ancaman tersebut telah berakhir, mungkin saja kerja sama atau aliansi tersebut dapat berakhir pula. Ketika ada ketidakseimbangan (*imbalance)* dalam ancaman, negara akan membentuk suatu aliansi atau meningkatkan

pertahanan dan keamanan internal untuk mengurangi kerentanan negaranya (Yani dkk, 2017:120).

Apabila banyak negara menyeimbangkan kekuatan dan *power* untuk melawan musuh dibandingkan untuk *band wagoning,* negara dapat dikatan menyeimbangi, ketika dapat menyamakan dan menyeimbangi kekuatan musuh dan kekuatan negara terkuat, namun tanpa disadari hal ini malah menimbulkan ancaman yang lebih besar dari negara lain. Terdapat tingkat ancaman suatu negara terhadap negara lain diantaranya fungsi dari *power*nya, kedekatan geografis, serangan militer, kemampuan dan sikap agresif dari suatu negara (Yani dkk, 2017:120).

2.2 Kerangka Pemikiran

Keadaan yang terjadi di Semenanjung Korea saat ini telah menjadi tinjauan tambahan banyak pihak dalam melihat keadaan keamanan internasional dan hal tersebut masih dilakukan hingga saat ini. Hal ini bukan tidak beralasan melihat bahwa dalam perang yang akhirnya membagi Korea menjadi Korea Selatan dan Korea Utara tersebut, isu yang muncul bukan hanya mengenai senjata nuklir, tetapi juga keterlibatan negara lain meskipun secara tidak langsung. Aktor yang berpengaruh bukan hanya kedua negara di Semenanjung Korea tetapi juga melibatkan negara-negara besar di baliknya. Terlihat melalui keterlibatan negara besar yang memiliki kepentingan di dalam Korea Selatan seperti Amerika Serikat serta kepentingan di Korea Utara Seperti Tiongkok.

Melihat perkembangan konflik, terlihat jelas bahwa konflik di Semenanjung Korea ini menjadi perhatian dunia internasional, baik terkait dengan isu yang diangkat maupun nuklir maupun keterlibatan negara-negara besar dalam konflik tersebut meski secara tidak langsung. Konflik antara Korea Utara dan Selatan ini pada akhirnya mendorong negara-negara untuk ikut mengambil sikap mengenai kondisi keamanan yang berkembang. Dapat dikatakan bahwa konflik di semenanjung Korea telah mempengaruhi situasi keamanan internasional. Mengambil sikap mengenai kondisi keamanan yang berkembang.

Hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan hingga pada waktu ini masih terpelihara dengan baik karena memang ada kepentingan yang saling membutuhkan, Kepentingan Amerika Serikat dalam krisis Semenanjung Korea jelas terlihat dari perbuatan, pernyataan dan tanggapannya. Salah satunya adalah memperkuat keberadaannya disana khususnya di Asia Timur sehingga membuat negara-negara di wilayah tersebut untuk semakin tergantung kepadanya. Amerika Serikat berusaha mengendalikan krisis untuk menguatkan posisi di kawasan Asia Timur, dan menunjukkan kepemimpinannya, terutama untuk menakut-nakuti Tiongkok bahwa Amerika Serikat tidak segan untuk mengobarkan perang di tetangga dekat dan sekutu Tiongkok, seperti Korea Utara kapan saja.

Kepentingan Korea Selatan menjadi kepentingan yang sangat penting terkait dengan persatuan nasional di dalam Korea, Selain itu, masalah keamanan kemudian juga tidak hanya yang terkait dengan masalah nuklir, tetapi juga imbas dari keberadaan nuklir itu sendiri yang kemudian menciptakan masalah seperti ekonomi, serta masalah keamanan energi.

Kepentingan Tiongkok di Semenanjung Korea tercermin dalam kebijakan lama Beijing tentang tidak ada perang, tidak ada ketidakstabilan, dan tidak ada kekuatan nuklir. Secara umum Tiongkok berbagi kepentingan yang sama dengan Amerika Serikat, mendukung sanksi UN atas Korea Utara, mendukung denuklirisasi, mendukung unifikasi Korea Selatan dan Korea Utara. Tiongkok hanya menginginkan stabilitas dan perdamian di Semenanjung Korea, Tiongkok mendukung Korea Utara namun tidak untuk semua tindakannya.

Kepentingan Jepang juga tidak jauh berbeda dengan Amerika Serikat dan Tiongkok yaitu menjaga stabilitas keamanan di Semenanjung Korea, jika keamanan stabilitas di Semenanjung Korea membaik/stabil tentu akan membantu Jepang dalam kemajuan ekonomi, dan dalam hal keamanan Jepang akan sangat terbantu jika situasi di Semenanjung Korea tidak menunjukan hal yang berbahaya karena Jepang berada dekat dengan konflik Semenanjung Korea.

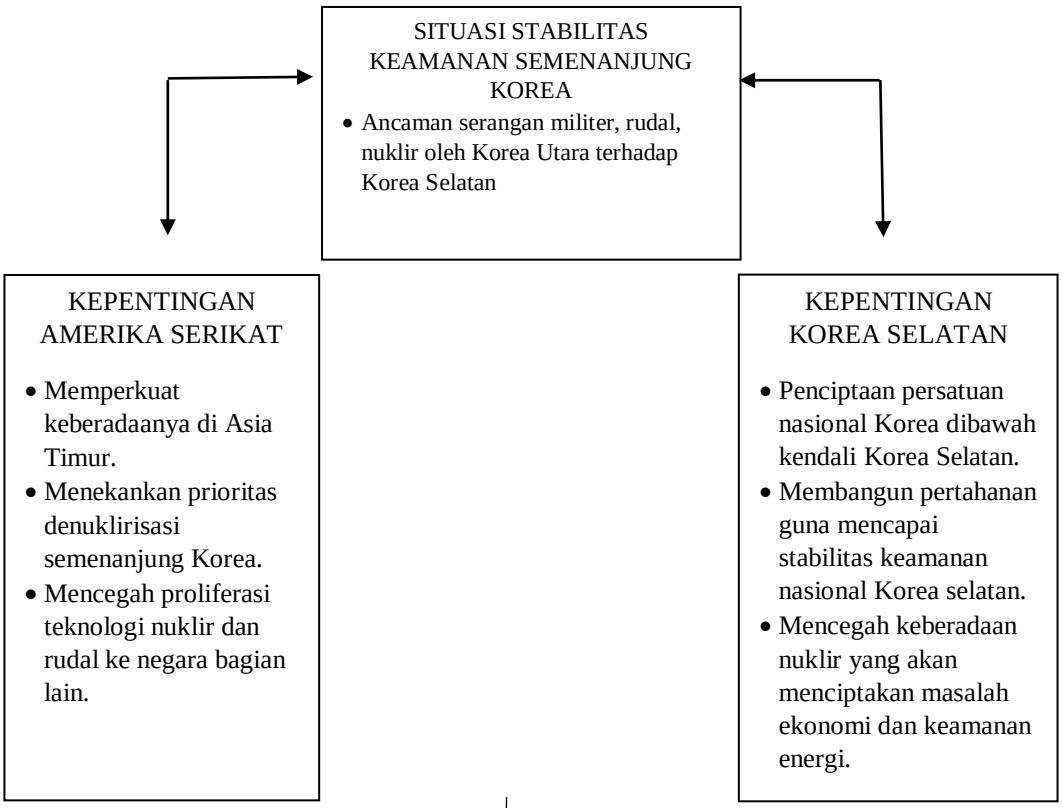
Antara Korea Selatan dan Amerika Serikat sepakat melakukan perjanjian pertahanan bersama yang mengatur jika salah satu negara diserang oleh pihak ketiga maka pihak lain akan bertindak. Dan juga kesepakatan meliputi bantuan militer untuk kebijakan salah satu negara. Korea Selatan dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian kerja sama militer, ini ditujukan untuk menghadapi ancaman serangan militer Korea Utara setelah melakukan uji coba nuklir. Amerika Serikat dan Korea Selatan melangsungkan latihan militer bersama di tengah-tengah ketegangan di Semenanjung Korea.

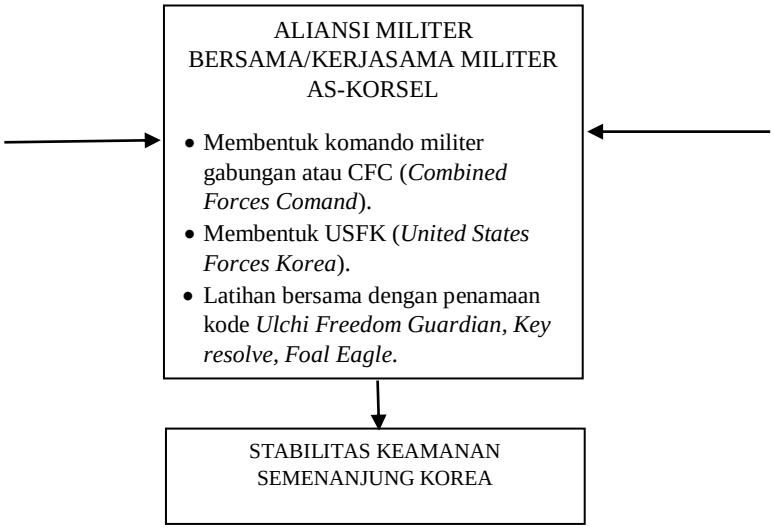
Peningkatan kemampuan militer dibutuhkan Korea Selatan karena ancaman serangan dari Korea Utara masih potensial. Pasukan Amerika Serikat masih tetap

ditempatkan di Korea Selatan sampai saat ini sehingga membuat Korea Selatan merasa aman dari invasi Korea Utara. Aliansi ini sangat penting untuk dilakukan agar terciptanya stabilitas keamanan di Semenanjung Korea.

Dalam menjaga keamanan, faktor militer masih menduduki posisi penting dalam keamanan negara, walaupun dalam lingkungan keamanan internasional ditekankan penyelesaian konflik melalui pendekatan politik, ekonomi, dan diplomasi, namun masih banyak negara menganggap cara militer merupakan usaha terpenting untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional. Reformasi militer besar-besaran dilakukan dengan mengembangkan senjata teknologi tinggi hampir dilakukan di seluruh dunia untuk beradaptasi dengan situasi baru dan dalam rangka menjaga kepentingannya masing-masing, beberapa negara telah menyesuaikan kebijakan militer, strategi militer dan meningkatkan pertahanan dalam memperbaiki kualitas kekuatan militer.

Gambaran singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut:





Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran